

Penerapan Good Corporate Governance dalam Meningkatkan Loyalitas Anggota Koperasi PKK Desa Pattiro Bajo

Wahyudin Syahban ¹, Sitti Nikmah Marzuki ², Muhammad Abdi Buhasyim ³

^{1 2 3} Institut Agama Islam Negeri Bone, Indonesia

* Wahyudin13d@gmail.com

Abstract

Penelitian membahas tentang Penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) dalam Meningkatkan Loyalitas Anggota Koperasi PKK Desa Pattiro Bajo. Tujuan penelitian ini adalah (1) Untuk mengetahui bagaimana penerapan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) pada Koperasi PKK Desa Pattiro Bajo, (2) Untuk mengetahui apa saja faktor yang mempengaruhi penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) di Koperasi PKK Desa Pattiro Bajo, (3) Untuk mengetahui bagaimana bentuk penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) dalam meningkatkan loyalitas anggota di Koperasi PKK Desa Pattiro Bajo. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) di Koperasi PKK Desa Pattiro Bajo menunjukkan adanya upaya untuk menciptakan tata Kelola koperasi yang baik, namun masih menghadapi beberapa kendala. Selain itu, faktor yang mempengaruhi penerapan GCG di Koperasi PKK Desa Pattiro bajo yaitu minimnya partisipasi anggota dalam pengambilan keputusan dan keterbatasan dana yang menyebabkan pelaporan dan administrasi koperasi belum berjalan dengan rapi dan konsisten. Namun, bentuk penerapan seperti transparan dalam pelaporan keuangan, yang membuat anggota merasa percaya dan aman karena mengetahui pengguna dana koperasi secara jelas.

Keywords: *Good Corporate Governance (GCG), Loyalitas Anggota, Koperasi PKK*

Pendahuluan

Koperasi sebagai mesin penting dari kapitalisme modern telah mampu menciptakan kesejahteraan dalam perekonomian. Namun, bersamaan dengan keberhasilannya itu, kehidupan sosial dalam lingkungan alam berada dalam kondisi genting. Mesin kesejahteraan ini ternyata mengancam keadilan dan kelestarian dua nilai yang tidak kalah pentingnya bagi kehidupan Bersama manusia. Karenan itu para penulis kemudian mengajukan koperasi sebagai alternatif institusional. Dengan melakukan peninjauan sejarah dan penggunaan data empiris, terlihat bahwa walaupun di perekonomian maju lainnya koperasi dapat berperan signifikan di Indonesia (Thayf, et al., 2022). Menurut Mohammad Hatta, koperasi adalah usaha Bersama untuk memperbaiki nasib penghidupan ekonomi berdasarkan prinsip tolong menolong. Sedangkan menurut UU No. 12 Tahun 1967 pengertian koperasi adalah organisasi ekonomi, yang berwatak sosial dan dikelola berdsarkan kekeluargaan. Terdapat dua pemahaman tentang koperasi yaitu koperasi sebagai Gerakan ekonomi rakyat dan koperasi sebagai badan usaha dengan tujuan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila (Mgs Muhammad et al., 2023). Dalam Undang- Undang Nomor 25 Tahun 1992 menyebutkan bahwa

prinsip koperasi di Indonesia yaitu sebagai berikut: a) Keanggotaan bersifat terbuka dan sukarela; b) Pengelolaan dilakukan secara demokratis; c) Pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota; d) Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal; e) Kemandirian; f) Pendidikan perkoperasian; g) Kerjasama antar koperasi.

Gerakan PKK sebagai organisasi perempuan yang masih bertahan hingga sekarang melembaga di tingkat Provinsi, Kabupaten, Kecamatan, dan Kelurahan/Desa. Menurut Peraturan Menteri dalam negeri No. 36 tahun 2020 tentang Peraturan dan Pelaksanaan peraturan presiden No. 99 tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga PKK dijelaskan sebagai Gerakan dalam pembangunan masyarakat yang tumbuh dari dan oleh masyarakat untuk mencapai keluarga yang beriman, bertaqwa kepada tuhan yang maha esa, berakhlak mulia dan berbudi luhur, sehat, sejahtera, maju dan mandiri, dengan kesetaraan dan keadilan gender, serta kesadaran hukum dan lingkungan. Tujuan dari perkumpulan yang terdiri dari kaum ibu-ibu adalah untuk memastikan keberhasilan program PKK. Program tersebut melibatkan penggerakan dan pembinaan masyarakat dalam melaksanakan sepuluh program pokok PKK, dengan keluarga sebagai unit terkecil yang ditargetkan untuk mencapai kesejahteraan. Program-program utama PKK melibatkan aspek-aspek seperti penghayatan dan pengamalan Pancasila, gotong royong, pangan, sandang, perumahan, tata laksana rumah tangga, Pendidikan dan keterampilan, Kesehatan, pengembangan kehidupan berkoperasi, kelestarian lingkungan hidup, serta perencanaan sehat.

Terlaksananya program pokok PKK merupakan tolak ukur partisipasi kader PKK yang melibatkann ibu rumah tangga untuk mensukseskan pembangunan di desa. salah satu program PKK yang melibatkann peran perempuan dalam membantu perekonomian keluarga dengan kehidupan berkoperasi. koperasi merupakan cerminan ekonomi kerakyatan untuk mensejahterakan anggota koperasi. Pentingnya menumbuhkan rasa kesadaran kehidupan berekonomi dalam membangun koperasi untuk memberdayakan sumber-sumber ekonomi dan sumber daya manusia yang belum efektif dimanfaatkan menjadi suatu sumber daya produktif yang menumbuhkan nilai tambah. Koperasi menggabungkan potensi-potensi kecil yang sebelumnya terpisah, menciptakan kekuatan Bersama yang lebih besar sebagai bagian dari Gerakan ekonomi partisipatif. Koperasi Wanita hadir dengan tujuan memenuhi kebutuhan hidup perempuan dan menjadi platform untuk memberdayakan mereka. Melalui keberadaan koperasi, perempuan berupaya memberikan dukungan ekonomi dan meningkatkan peran serta perempuan dalam masyarakat, menciptakan lingkungan yang memungkinkan mereka berkembang dan mandiri (Asriani et al., 2024).

Pada masa yang akan datang peran koperasi di Indonesia diperkirakan akan tetap bahkan semakin penting, terutama dalam kaitannya untuk menjadi wahana pengembangan ekonomi rakyat, namun demikian koperasi juga akan menghadapi tantangan yang semakin berat (Handayani & Rahmadania, 2020). Pengelolaan manajemen koperasi didasarkan pada aturan yang berlaku diantaranya AD/ART, kebijakan, struktur organisasi, peran dan aturan yang memiliki fungsinya masing-masing sesuai jobdesk dari para pengurus, pengawas, dan pengelola dilakukan secara tersistem dalam menjalankan koperasi yang berlandaskan visi dan misi serta tata Kelola (*Good Corporate Governance*) koperasi yang transparan, mandiri, memiliki akuntabilitas, pertanggung jawaban, dan kewajiban. Serta kurangnya perhatian sistem informasi dalam pengembangan diri koperasi untuk mempermudah informasi dan mempermudah pengelolaan koperasi sehingga pengambilan keputusan lebih cepat.

Koperasi PKK Desa Pattiro Bajo berdiri pada tahun 2005 dengan tujuan memberdayakan ekonomi keluarga melalui kegiatan simpan pinjam dan pelatihan kewirausahaan. Koperasi ini memiliki sekitar 114 anggota aktif yang terdiri dari ibu rumah tangga dan pelaku usaha mikro. Total asset koperasi pada tahun 2024 mencapai Rp.163.578.407 dengan pendapatan utama berasal dari bunga pinjaman dan kontribusi usaha anggota. Namun koperasi ini menghadapi beberapa tantangan yang mengancam keberlanjutan operasional dan loyalitas anggota. Berdasarkan data awal, tantangan tersebut yaitu (1) Penurunan partisipasi anggota dalam rapat anggota tahunan (RAT) dan kegiatan koperasi lainnya, dan (2) Ketidakteraturan dalam penyetoran simpan wajib oleh Sebagian anggota, yang memengaruhi stabilitas keuangan koperasi.

Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan bukti empiris mengenai dampak dari diterapkannya kelima prinsip GCG pada koperasi PKK Desa Pattiro Bajo. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai pertimbangan dalam mengelolah organisasi koperasi sehingga tidak hanya menggunakan prinsip koperasi saja, tetapi juga menggunakan prinsip-prinsip GCG sebagai pedoman agar dapat meningkatkan kinerja koperasi dan juga diharapkan bermanfaat untuk memberikan tambahan pengetahuan dan pemahaman kepada peneliti lain yang ingin melakukan penelitian agar topik pengaruh prinsip-prinsip GCG.

Penerapan sistem *Good Corporate Governance* (GCG) yang diterapkan pada koperasi penting dilakukan agar dalam pengelolaan koperasi dapat merubah sistem organisasi, dengan tujuan adalah menciptakan kinerja, pengendalian internal yang baik dan mengurangi kelemahan tata Kelola koperasi yang professional dan akuntabel serta memiliki hubungan yang baik bagi stakeholder serta shareholder dan didukung dengan sistem informasi yang dapat memanfaatkan perkembangan teknologi lebih bermanfaat dan efisien. Penerapan *Good Corporate Governance* juga dapat mencegah terjadinya praktik-praktik yang tidak sehat seperti perdagangan orang dalam (*insider trading*), akuisisi internal dan transaksi hubungan istimewa yang merugikan pemegang saham minoritas. Selain itu, penerapan tata Kelola perusahaan yang baik mendorong terciptanya iklim persaingan yang sehat dalam suasana keterbukaan informasi. Dengan demikian apabila semua perusahaan menerapkan mekanisme *Good Corporate Governance* diharapkan bahwa kinerja perusahaan di Indonesia akan meningkat. Terutama bagi koperasi PKK Desa Pattiro Bajo, yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi anggota sebagai bagian dari upaya pemberdayaan masyarakat pedesaan.

Konsep strategi pemasaran dalam rangka menjaga keberlangsungan usaha koperasi. Salah satu strategi pemasaran yang selalu mendapatkan perhatian dalam rangka menjaga kelangsungan bisnisnya adalah dengan memberikan perhatian terhadap peningkatan loyalitas anggotanya. Loyalitas anggota merupakan salah satu kunci yang harus diperhatikan untuk meningkatkan usaha dan keberlangsungannya. Anggota yang merasa loyal terhadap perusahaan akan selalu meningkatkan transaksinya dan akan dapat memberikan rekomendasi kepada orang di sekitarnya. Kondisi ini yang mampu meningkatkan perkembangan dan keberlangsungan perusahaan. Perusahaan harus mematuhi seperangkat hukum, aturan, dan norma yang dikenal sebagai "Tata Kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*)" untuk memastikan bahwa sumber dayanya dipakai secara efektif dan efisien untuk menghasilkan keuntungan ekonomi jangka Panjang bagi pemegang saham dan masyarakat setempat. Namun dalam praktiknya, keberlangsungan koperasi sangat bergantung pada loyalitas anggota. Loyalitas anggota koperasi tercermin sejauh mana mereka aktif dalam kegiatan, setia menjadi anggota, serta percaya terhadap pengelolaan koperasi. Berdasarkan observasi awal, di Koperasi PKK Desa Pattiro Bajo, ditemukan bahwa tingkat partisipasi dan

keaktifan anggota belum maksimal. Dari total 114 anggota, hanya sekitar 85-90 orang yang mengikuti rapat tahunan. Hal ini menunjukkan loyalitas anggota masih perlu ditingkatkan.

Transparansi dan Akuntabilitas merupakan suatu hal yang sangat penting bagi pengelolaan keuangan setiap organisasi, baik organisasi pemerintah maupun non pemerintah. Pelaksanaan akuntabilitas dengan menjalankan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* sangat penting di setiap organisasi yang meliputi transparansi dan rasa keadilan. Hal ini bertujuan agar organisasi tersebut dipercaya oleh stakeholder karena itu setiap organisasi di pemerintahan maupun non pemerintahan harus melaksanakan prinsip akuntabilitas tersebut. Konsep *Good Corporate Governance* berasal dari teori Agency yang meyakini bahwa dalam suatu perusahaan terdapat dua entitas yang saling berinteraksi, yaitu manajemen sebagai agen dan pemilik sebagai principal (Nurhaliza et al., 2023). GCG merupakan sebuah sistem yang mengatur dan mengawasi perusahaan (Sari, 2021). GCG berfungsi sebagai mekanisme pengawasan yang dilakukan oleh para pemangku kepentingan terhadap manajemen perusahaan dengan tujuan meningkatkan keterbukaan, pertanggung jawaban, dan kesadaran perusahaan (Suprpti et al., 2019). Sukandar dan rahardja menyatakan bahwa konsep *Good Corporate Governance* yang baik menempatkan penekanan pada pentingnya memberikan hak pemegang saham untuk menerima informasi yang benar, tepat, dan akurat dalam pengelolaannya. IICG (*The Indonesian Institute for Corporate Governance*) menggambarkan *Good Corporate Governance* sebagai rangkaian struktur, sistem, dan prosedur yang diterapkan oleh perusahaan guna meningkatkan nilai perusahaan secara berkelanjutan dalam jangka Panjang, sambil tetap memperhatikan kepentingan pihak-pihak lain yang terlibat, dengan mengacu pada peraturan hukum dan norma yang berlaku (Handayani et al. 2024).

Metode

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian kualitatif karena metodologi penelitiannya didasarkan pada data yang dikumpulkan dilapangan (Penelitian Lapangan) (Tholibiln & Nahdlatuth 2024). Pendekatan kualitatif adalah metode yang focus pada pengamatang yang mendalam. Oleh karenanya, penggunaan metode kualitatif dalam penelitian dapat menghasilkan kajian atas suatu fenomena yang lebih komprehensif. Penelitian kualitatif yang memperhatikan humanisme atau individu manusia dan perilaku manusia merupakan jawaban atas kesadaran bahwa semua akibat dari perbuatan manusia terpengaruh pada aspek-aspek internal individu. Aspek internal tersebut seperti kepercayaan, pandangan politik, dan latar belakang sosial dari individu yang bersangkutan (Ardianto 2024). Penelitian kualitatif ini didasarkan pada tujuan penelitian untuk mendapatkan bukti empiris mengenai dampak penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) pada koperasi PKK Desa Pattiro Bajo.

Penelitian yang akan dilakukan ini bertempat di Desa Pattiro Bajo. Adapun waktu penelitian yang digunakan dalam melakukan penelitian ini terhitung setelah ada surat rekomendasi dari Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone. Penelitian ini dilakukan selama satu bulan. Pengumpulan data yang dilakukan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan penelitian. Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini terdiri dari 2 yaitu, data primer dan sekunder (Nashrullah et al. 2023). Subjek dalam penelitian ini yaitu Anggota Koperasi PKK Desa Pattiro Bajo. Objek penelitian ini yaitu Penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) dan Loyalitas anggota koperasi. Objek ini mencakup bagaimana GCG diterapkan di koperasi tersebut dan bagaimana penerapan ini memengaruhi Loyalitas Anggota Koperasi PKK Desa Pattiro Bajo.

Teknik pengumpulan data adalah cara-cara yang digunakan peneliti dalam mengumpulkan data penelitian, untuk penelitian ini digunakan 3 teknik pengumpulan data, yaitu: observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data adalah proses mengukur urutan data, mengorganisasikannya kedalam suatu pola, kategori dan uraian dasar (Nurdewi 2022). Dalam melaksanakan Teknik Analisis tersebut diatas, ada 3 alus kegiatan yang terjadi secara bertahap yaitu: 1) Reduksi data atau klasifikasi data, merangkum semua hasil data, memfokuskan hal-hal penting, penulis melakukan penyederhanaan data dari catatan yang dilakukan di lapangan dan membuat ringkasan yang akan dikategorikan berdasarkan jawaban (Sugiyono 2017). 2) Penyajian Data. Kegiatan analisis data adalah model data. Kita mendefinisikan "Model" sebagai suatu kumpulan informasi yang tersusun yang membolehkan pendeskripsian kesimpulan dan pengambilan Tindakan (Juliady 2024). Penyajian data dalam hal ini adalah penyampaian informasi berdasarkan data yang diperoleh dari Anggota Koperasi PKK Desa Pattiro Bajo sesuai dengan fokus penelitian untuk disusun secara baik, sehingga mudah dilihat, dibaca dan dipahami tentang suatu kejadian dan Tindakan atau peristiwa yang terkait budaya kerja anggota dalam bentuk teks naratif. Pada tahap ini dilakukan perangkuman terhadap penelitian dalam susunan yang sistematis untuk mengetahui melek bisnis dalam meningkatkan produktivitas. Kegiatan pada tahapan ini antara lain: (a) Membuat rangkuman secara deskriptif dan sistematis, sehingga tema sentral dapat diketahui dengan mudah. (b) Memberi makna setiap rangkuman tersebut dengan memperhtikan kesesuaian penelitian. Jika dianggap belum memadai makna dilakukan penelitian Kembali ke lapangan untuk mendapatkan data-data yang dibutuhkan dan sesuai alur penelitian. 3) Penarikan Kesimpulan. Menarik kesimpulan penelitian selalu harus mendasarkan diri atas semua data yang diperoleh dalam kegiatan penelitian. Dengan kata lain, penarikan kesimpulan harus didasarkan atas data, bukan atas angan-angan atau keinginan peneliti. Jadi kesimpulannya didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat penulis kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan merupakan kesimpulan yang kredibel.

Suatu program dikatakan efektifitas apabila usaha atau tindakan yang dilakukan sesuai dengan hasil yang diharapkan (Widianita et al., 2023). Efektifitas program dapat dirumuskan sebagai tingkat dalam melihat sasaran, sejauh mana sasaran program telah ditetapkan. Suatu program atau kegiatan dapat dikatakan efektif apabila dapat memberikan efek, akibat, pengaruh, hasil, dan tentu memberikan kepuasan terhadap masyarakat.

Hasil

Gambaran Umum Objek Penelitian

Koperasi PKK Desa Pattiro Bajo merupakan salah satu bentuk koperasi wanita yang berada dibawah naungan Tim Penggerak PKK (Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga) tingkat desa. Koperasi ini didirikan sebagai wadah ekonomi bagi ibu-ibu rumah tangga di Desa Pattiro Bajo, Kecamatan Sibulue, Kabupaten Bone. Koperasi PKK Desa Pattiro Bajo pertama kali didirikan pada tahun 2005 yang dimana pada tahun tersebut setiap desa diharuskan memiliki koperasi, kemudian koperasi ini mulai memiliki status sebagai badan hukum pada tahun 2019 artinya memiliki hak dan kewajiban hukum seperti individu, dan melakukan perbuatan hukum. Tujuan utama koperasi ini untuk memberdayakan ekonomi keluarga melalui kegiatan simpan pinjam dan pelatihan kewirausahaan.

Sebagai koperasi yang berbasis komunitas, keanggota koperasi terdiri dari 114 anggota yang terdiri dari ibu-ibu PKK desa setempat yang aktif dalam kegiatan sosial kemasyarakatan.

Kegiatan utama koperasi meliputi simpan pinjam, arisan kelompok, dan kewirausahaan. Dalam menjalankan operasionalnya, koperasi ini mengacu pada prinsip koperasi dan ketentuan yang dikeluarkan oleh Dinas Koperasi Kabupaten Bone. Rapat Anggota Tahunan (RAT) menjadi forum utama pengambilan keputusan dan pertanggungjawaban pengurus. Seiring dengan dukungan dari dinas koperasi dan pembinaan dari pemerintah desa, koperasi ini terus berupaya meningkatkan kapasitas kelembagaan dan mendorong keterlibatan aktif seluruh anggotanya. Koperasi PKK Desa Pattiro Bajo didirikan dengan Visi “Mewujudkan koperasi yang mandiri, transparan, dan berkeadilan sebagai sarana pemberdayaan ekonomi perempuan Desa Pattiro Bajo”. Misi Koperasi PKK Desa Pattiro Bajo yaitu (1) Meningkatkan kesejahteraan anggota melalui kegiatan usaha simpan pinjam dan usaha produktif berbasis kebutuhan rumah tangga, (2) Membangun budaya transparansi dan akuntabilitas dalam setiap laporan dan kegiatan keuangan koperasi, (3) Meningkatkan kapasitas pengurus dan anggota melalui pelatihan dan Pendidikan perkoperasian secara berkala.

Penerapan Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance (GCG)

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan di Koperasi PKK Desa Pattiro Bajo dengan menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi untuk mendapatkan penelitian, kemudian didapatkan hasil bahwa penerapan prinsip *Good Corporate Governance* berdasarkan prinsip transparansi (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*), kemandirian (*independency*), dan kesetaraan (*fairness*) dinyatakan cukup baik. *Good Corporate Governance* atau tata Kelola koperasi yang baik merupakan suatu hal yang sangat penting untuk dilakukan, karena hal itu guna melindungi kepentingan koperasi dan juga untuk meningkatkan ketaatan koperasi terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku pada koperasi. Untuk mengetahui sejauh mana penerapan *Good Corporate Governance* (GCG), peneliti melakukan penilaian terhadap Koperasi PKK Desa Pattiro Bajo. Penilaian ini diambil langsung dengan pengurus dan anggota koperasi, yang dianalisis berdasarkan persepsi, pengalaman, dan praktik nyata yang terjadi dilapangan. Wawancara dilakukan secara kualitatif dan tematik, kemudian dikonversi ke dalam skala penilaian. Penilaian ini diambil langsung dari data wawancara dengan 5 responden (anggota dan pengurus koperasi). Skor diberikan berdasarkan analisis tematik dari jawaban responden, menggunakan skala 1-5 untuk masing-masing prinsip.

1. Transparansi (*transparency*)

Transparansi merupakan menumbuhkan kepercayaan antara pengelola dan pengurus koperasi dengan anggota melalui penyediaan informasi serta menjamin kemudahan untuk mendapatkan informasi. Kemudian transparansi juga dapat dikatakan sebagai keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam melaksanakan serta mengemukakan informasi materiil yang relevan mengenai kegiatan operasional koperasi.

Berdasarkan hasil wawancara, dengan beberapa anggota koperasi, diketahui bahwa prinsip transparansi pada Koperasi PKK Desa Pattiro Bajo telah mulai diterapkan oleh pengurus, meskipun belum optimal. Salah satu anggota menyampaikan bahwa laporan keuangan biasanya disampaikan saat rapat tahunan, dan sesekali dibagikan dalam grup WhatsApp jika ada permintaan. Namun, rincian penggunaan dana tidak selalu dijelaskan secara mendalam. Selain itu, peneliti juga menemukan informasi dari anggota koperasi bahwa penyampaian informasi laporan keuangan tersebut belum tersedia secara rutin. Dalam hal tersebut dapat dikatakan bahwa pengurus telah membuka akses informasi, namun sistem

penyampaianannya belum konsisten dan menyeluruh. Berikut dibawah ini tabel indikator penilaian terkait pelaksanaan prinsip transparansi di Koperasi PKK Desa Pattiro Bajo.

Tabel 1. Indikator Pelaksanaan Prinsip Transparansi (transparency)

Indikator Pelaksanaan Prinsip Transparansi (<i>transparency</i>)	Terlaksana	
	Ya	Tidak
Laporan keuangan tersedia	✓	
Disampaikan secara berkala	✓	
Disampaikan ke semua anggota secara merata		✓
Disertai rincian penggunaan dana yang jelas		✓

Sementara itu, pengurus menyatakan bahwa mereka telah membuat laporan tertulis dan siap membagikannya kepada anggota. Hal ini menunjukkan adanya komitmen untuk terbuka, tetapi saluran komunikasi dan frekuensi penyampaian informasi secara berkala. Berdasarkan hasil penelitian peneliti menilai bahwa penerapan prinsip transparansi di Koperasi PKK Desa Pattiro Bajo cukup efektif diterapkan, hal itu karena indikator penerapan transparansi hanya 2 aspek/item yang terlaksana.

2. Akuntabilitas (*Accountability*)

Akuntabilitas merupakan prinsip dasar yang digunakan untuk meningkatkan kejelasan fungsi, pelaksanaan serta pertanggung jawaban bagi organ koperasi sebagai pengurus atau pengambil keputusan sehingga kegiatan operasional koperasi dapat berjalan secara efektif dan efisien dalam hal mewujudkan kesejahteraan anggotanya.

Berdasarkan hasil wawancara menunjukkan bahwa adanya keraguan dari sebagian anggota. Sebagian anggota mengungkapkan bahwa keputusan kadang sudah dibuat oleh pengurus terlebih dahulu sebelum disampaikan kepada anggota. Pertanggungjawaban biasanya hanya dibacakan secara singkat pada saat rapat, tanpa adanya ruang diskusi atau klarifikasi lebih lanjut. Namun, pengurus menyatakan bahwa laporan tahunan telah disiapkan dengan lengkap dan mereka siap menjawab pertanyaan jika ada. Hal ini mencerminkan bahwa akuntabilitas secara administratif telah dilaksanakan, tetapi belum menyentuh aspek partisipatif dan evaluatif dari anggota. Pelaksanaan prinsip ini masih bersifat formal dan belum sepenuhnya mendorong akuntabilitas yang transparan dan interaktif.

Tabel 2. Indikator Pelaksanaan Prinsip Akuntabilitas (*Accountability*)

Indikator Pelaksanaan Prinsip Akuntabilitas (<i>accountability</i>)	Terlaksana	
	Ya	Tidak
Ada laporan pertanggungjawaban	✓	
Diskusi terbuka dilakukan		✓
Keputusan dibuat bersama anggota		✓
Mekanisme evaluasi berjalan		✓

Berdasarkan hasil penelitian terhadap koperasi, maka dapat dikatakan bahwa pelaksanaan prinsip akuntabilitas di dalam Koperasi PKK Desa Pattiro Bajo kurang efektif dilaksanakan. Hal itu karena indikator pelaksanaan prinsip akuntabilitas hanya 1 aspek/item yang terlaksana dari 4 indikator.

3. Pertanggungjawaban (*Responsibility*)

Pertanggungjawaban (*Responsibility*) merupakan prinsip dasar guna meningkatkan kemampuan moral bagi pengurus dan pengelola agar mampu memberikan pelayanan yang terbaik kepada para anggota tanpa terhambat oleh kepentingan pribadi atau hal yang lainnya

yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Berdasarkan dari hasil observasi dan wawancara, peneliti menilai prinsip responsibilitas pada koperasi PKK Desa Pattiro Bajo menunjukkan bahwa hampir semua indikator terpenuhi. Berikut ini adalah indikator penilaian terkait dengan pelaksanaan prinsip responsibilitas.

Tabel 3. Indikator Pelaksanaan Prinsip Responsibilitas

Indikator Pelaksanaan Prinsip Pertanggungjawaban (<i>responsibility</i>)	Terpenuhi	
	Ya	Tidak
Administrasi diperbarui	✓	
Mengikuti arahan dinas	✓	
Pernah mengadakan pelatihan sosial	✓	
Sosialisasi internal aktif		✓

Hasil wawancara dengan pengurus menunjukkan bahwa koperasi telah mengikuti arahan dan aturan dari dinas koperasi, termasuk pembaruan dokumen dan pelaporan tahunan. Namun, dari sisi anggota mengatakan bahwa masih ada yang tidak mengetahui secara pasti bentuk regulasi atau program yang sedang diterapkan. Beberapa kegiatan sosial, seperti pelatihan kewirausahaan, sudah dilakukan tetapi masih bersifat insidental.

Penerapan prinsip responsibilitas pada Koperasi PKK Desa Pattiro Bajo cukup efektif karena indikator pelaksanaan prinsip responsibilitas hanya 3 aspek/item yang terlaksana, artinya pelaksanaan cukup efektif. Ini menandakan bahwa prinsip responsibilitas sudah ada dalam aspek kepatuhan eksternal, tetapi belum maksimal dalam tanggungjawab sosial internal kepada anggota. Edukasi dan keterlibatan sosial masih perlu diperkuat.

4. Kemandirian (*Independency*)

Prinsip independensi merupakan prinsip dasar guna meningkatkan kemampuan moral bagi pengurus dan pengelola agar mampu memberikan pelayanan yang terbaik kepada para anggota tanpa terhambat oleh kepentingan pribadi atau hal yang lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Pada prinsip kemandirian berarti koperasi tidak dapat diintervensi atau dipengaruhi oleh pihak manapun.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dengan pengurus serta anggota koperasi, peneliti menilai prinsip kemandirian dan profesionalisme pada Koperasi PKK Desa Pattiro Bajo telah terlaksana cukup baik. Hal itu karena Koperasi PKK Desa Pattiro Bajo telah menerapkan indikator prinsip Kemandirian dan Profesionalisme sebanyak 2 aspek/item. Adapun indikator-indikator yang berhasil dipenuhi seperti yang tertera pada tabel dibawah ini:

Tabel 4. Indikator Pelaksanaan Prinsip Kemandirian (*Independency*)

Indikator Pelaksanaan Prinsip Kemandirian (<i>independency</i>)	Terlaksana	
	Ya	Tidak
Pengambilan keputusan dilakukan internal	✓	
Selalu melalui forum musyawarah		✓
Didukung partisipasi aktif anggota		✓
Tidak ada intervensi eksternal	✓	

Pada prinsip kemandirian dan profesionalisme Koperasi PKK Desa Pattiro Bajo dapat dikatakan cukup baik dalam menerapkan prinsip *Good Corporate Governance*. Berdasarkan hasil penelitian di Koperasi PKK Desa Pattiro Bajo bahwa indikator pelaksanaan prinsip independensi hanya 2 aspek/item yang terlaksana, artinya pelaksanaan cukup efektif. Meskipun jika dilihat dari tabel penilaian diatas masih terdapat indikator yang belum terpenuhi. Dalam prinsip ini Sebagian besar anggota menyatakan bahwa tidak mendapat campur tangan

dari pihak luar. Pengambilan keputusan dilakukan secara internal oleh pengurus dan anggota. Namun, karena rendahnya partisipasi anggota, beberapa keputusan penting akhirnya diambil langsung oleh pengurus inti tanpa proses musyawarah yang melibatkan seluruh anggota. Hal ini menunjukkan bahwa prinsip independensi telah dijaga dari pengaruh eksternal, tetapi dari segi tata kelola internal, pengambilan keputusan belum sepenuhnya kolektif dan demokratis. Maka, independensi institusional kuat, tetapi independensi prosedural masih lemah.

5. Kesetaraan dan Kewajaran (*Fairness*)

Prinsip kesetaraan merupakan koperasi memberi kesempatan yang sama bagi seluruh anggota koperasi guna meningkatkan kesejahteraan anggota serta keadilan dalam memenuhi hak anggota yang timbul berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan juga tanggungjawab sosial koperasi. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara, peneliti menilai prinsip keadilan pada Koperasi PKK Desa Pattiro Bajo telah dilaksanakan dengan baik. Adapun tabel penilaian adalah sebagai berikut:

Tabel 5. Indikator Pelaksanaan Prinsip Kesetaraan (*Fairness*)

Indikator Pelaksanaan Prinsip Kesetaraan (<i>Fairness</i>)	Terlaksana	
	Ya	Tidak
Hak dan kewajiban berlaku sama	✓	
Tidak ada perlakuan istimewa	✓	
Prosedur dijalankan konsisten	✓	
Pengurus responsive terhadap keluhan	✓	

Pada prinsip keadilan, peneliti menemukan informasi dari anggota koperasi yang menyampaikan bahwa semua anggota koperasi memiliki hak dan kewajiban yang sama, terutama dalam hal pinjaman dan penyetoran simpanan. Tidak ada perlakuan khusus bagi anggota tertentu, dan jika ada anggota yang belum memahami prosedur, pengurus biasanya memberikan penjelasan terlebih dahulu. Ini menunjukkan bahwa prinsip *fairness* telah dijalankan dengan baik. Perlakuan yang adil kepada seluruh anggota menumbuhkan rasa percaya dan kenyamanan yang menjadi fondasi penting bagi loyalitas jangka Panjang.

Berdasarkan gambaran umum hasil penelitian yang diperoleh, dapat dikatakan bahwa penerapan GCG di Koperasi PKK Desa Pattiro Bajo dengan klasifikasi penilaian dengan skor pencapaian 3.0. Salah satu teori yang sering digunakan untuk mengklasifikasikan kualitas GCG berasal dari *Organization for Economic Cooperation and Development* (OECD) serta teori dari *Forum for Corporate Governance in Indonesia* (FCGI). Keduanya menekankan bahwa kualitas penerapan GCG dapat dilihat dari sejauh mana lima prinsip utama diterapkan secara konsisten. Adapun klasifikasi kualitas penerapan GCG yang digambarkan pada tabel 4. 6 dibawah ini menunjukkan bahwa penerapan GCG di Koperasi PKK Desa Pattiro Bajo berada pada klasifikasi cukup efektif.

Tabel 6. Klasifikasi Kualitas GCG

Skor	Kategori	Interpretasi
1-2	Kurang	Sudah ada namun sangat minim.
3-4	Cukup	Sudah berjalan tapi belum konsisten.
5	Baik	Diterapkan secara menyeluruh.

Setelah melakukan penilaian terhadap prinsip *Good Corporate Governance* yaitu transparansi (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*), kemandirian dan profesionalisme (*independency*), dan keadilan (*fairness*). Berikut adalah rekapitulasi nilai dari kelima prinsip diatas:

Tabel 6 Rekapitulasi Penilaian Good Corporate Governance

Prinsip GCG	Deskripsi Hasil Wawancara	Skor (1-5)
Transparansi	Laporan keuangan disampaikan saat RAT, tidak semua anggota dapat informasi lengkap.	3
Akuntabilitas	Pengurus membuat laporan tahunan, namun anggota tidak banyak dilibatkan dalam pengambilan keputusan.	2
Responsibilitas	Pengurus taat aturan dinas koperasi, namun sosialisasi internal kurang maksimal.	3
Independensi	Tidak ada campur tangan dari luar, tetapi keputusan masih didominasi oleh pengurus inti.	3
Fairness	Semua anggota mendapatkan perlakuan yang adil, tidak ada pilih kasih dalam layanan koperasi.	4
Rata-rata		3.0
Kategori Umum		Cukup

Berdasarkan penilaian yang dilakukan melalui wawancara, dapat disimpulkan bahwa tingkat penerapan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) di Koperasi PKK Desa Pattiro Bajo berada pada kategori "Cukup" (rata-rata skor 3.0 dari 5). Aspek yang paling kuat adalah *fairness*, dimana seluruh anggota merasakan perlakuan yang adil. Sebaliknya, aspek yang perlu mendapatkan perhatian lebih adalah akuntabilitas, khususnya dalam hal pelibatan anggota dalam pengambilan keputusan dan pertanggung jawaban kinerja pengurus. Penilaian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi koperasi untuk melakukan perbaikan dan penguatan sistem pengelolaan agar kedepan prinsip-prinsip GCG dapat diterapkan secara menyeluruh, konsisten, dan berkelanjutan.

Faktor yang Mempengaruhi Penerapan *Good Corporate Governance* (GCG)

Penerapan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) dalam suatu koperasi tidak hanya dipengaruhi oleh kebijakan formal, tetapi juga oleh faktor-faktor internal yang berkembang dalam dinamika organisasi tersebut. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang dilakukan dengan pengurus dan anggota Koperasi PKK Desa Pattiro Bajo, ditemukan empat faktor dominan yang memengaruhi sejauh mana prinsip GCG dijalankan dengan efektif.

1. Pemahaman Anggota terhadap GCG Masih Rendah: Beberapa anggota menyatakan bahwa mereka belum memahami secara menyeluruh apa itu prinsip GCG. Sebagian bahkan belum pernah mendapatkan pelatihan atau sosialisasi terkait prinsip-prinsip tata kelola koperasi yang baik. Hal ini menunjukkan minimnya literasi GCG di kalangan anggota menjadi kendala awal dalam implementasi tata Kelola koperasi yang transparan dan bertanggungjawab.
2. Partisipasi Anggota yang Masih Rendah: Faktor berikutnya adalah rendahnya partisipasi anggota dalam kegiatan koperasi, terutama dalam rapat atau forum pengambilan keputusan. Pada faktor tersebut peneliti mendapatkan informasi dari anggota bahwa beberapa keputusan penting masih didominasi oleh pengurus inti karena kurangnya usulan atau kehadiran anggota. Rendahnya keaktifan ini berpengaruh terhadap pelaksanaan prinsip akuntabilitas dan independensi dalam pengambilan keputusan koperasi.
3. Keterbatasan Dana dan Sarana: Beberapa pengurus mengeluh keterbatasan dana koperasi, yang dapat berimbas pada sistem pelaporan dan pelayanan kepada anggota. Hal ini memengaruhi prinsip transparansi, dimana keterbukaan informasi belum dapat dijalankan secara maksimal karena keterbatasan sarana pendukung.

4. Budaya Kekeluargaan yang Kuat: Berdasarkan hasil wawancara dengan anggota koperasi, peneliti menemukan informasi bahwa pengambilan keputusan di koperasi seringkali berdasarkan kedekatan antar anggota dan rasa kekeluargaan yang tinggi. Meskipun hal ini menciptakan suasana yang harmonis, namun juga berpotensi mengaburkan objektivitas, sehingga berpengaruh pada penerapan prinsip *fairness* dan independensi.

Tabel 7. Faktor Penerapan GCG pada Koperasi PKK Desa Pattiro Bajo

Faktor	Deskripsi Hasil Wawancara	Dampak terhadap GCG	Rekomendasi Solusi
Rendahnya pemahaman anggota tentang GCG	Saya tidak tahu apa itu GCG, karena belum pernah ada pelatihan khusus. Kalau ada pelatihan, saya mungkin bisa lebih paham	Penerapan tidak konsisten, minim kesadaran terhadap hak/kewajiban	Adakan pelatihan/ sosialisasi rutin
Partisipasi anggota rendah	Kalau anggota tidak aktif, pengurus kadang bingung. Sehingga keputusan langsung dibuat oleh pengurus	Keputusan hanya melibatkan pengurus inti	Bangun forum diskusi aktif dan intensif
Keterbatasan dana dan sarana	Karena dana koperasi terbatas, belum bisa buat laporan rutin tiap bulan. Paling saat RAT saja.	Laporan keuangan tidak rutin, transparansi terbatas	Buat system pelaporan sederhana, manfaatkan media digital
Budaya kekeluargaan dominan	Kami saling kenal, jadi keputusan kadang lebih berdasarkan kekeluargaan.	Potensi konflik kepentingan, kurang objektif	Buat SOP musyawarah tertulis, bukan hanya informal

Secara menyeluruh, penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) di Koperasi PKK Desa Pattiro Bajo di pengaruhi Oleh empat faktor yaitu: Kurangnya pelatihan dan pemahaman tentang prinsip *Good Corporate Governance*, Rendahnya partisipasi anggota dalam proses pengambilan Keputusan, Keterbatasan sumber daya keuangan untuk mendukung sistem pelaporan dan transparansi, Budaya kekeluargaan yang dominan dalam koperasi

Faktor-faktor ini saling berkaitan dan perlu menjadi perhatian utama bagi koperasi dalam meningkatkan kualitas tata kelola ke depan. Upaya yang dapat dilakukan antara lain adalah mengadakan pelatihan GCG, memperkuat partisipasi anggota melalui komunikasi yang lebih aktif, serta mengembangkan sistem informasi dan pelaporan yang lebih efisien.

Bentuk Penerapan Good Corporate Governance (GCG) Dalam Meningkatkan Loyalitas Anggota di Koperasi PKK Desa Pattiro Bajo

Penerapan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) di Koperasi PKK Desa Pattiro Bajo secara bertahap memberikan dampak positif terhadap peningkatan loyalitas anggota. Hal ini tercermin dari berbagai bentuk keterlibatan aktif, kepercayaan yang tumbuh serta pernyataan langsung dari anggota yang mengaku tetap karena merasa nyaman, aman, dan dihargai dalam koperasi. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara, peneliti menemukan informasi dari anggota bahwa salah satu bentuk penerapan prinsip GCG yang paling dirasakan oleh anggota adalah keterbukaan informasi, khususnya dalam hal laporan keuangan. Pengurus secara rutin menyampaikan laporan keuangan pada saat Rapat Anggota Tahunan (RAT) dan jika ada anggota yang meminta, laporan juga dapat dibagikan melalui grup WhatsApp. Hal ini dinilai sangat penting karena memberikan rasa kepercayaan kepada anggota terhadap cara koperasi dikelola.

Selain itu, ada juga anggota koperasi menyampaikan bahwa tidak ada perlakuan khusus atau perbedaan dalam layanan, baik itu dalam hal pinjaman maupun kewajiban menyeter simpanan. Prinsip keadilan ini membuat anggota merasa dihargai dan memiliki posisi yang sama dalam koperasi, tanpa memandang latar belakang atau kedekatan dengan pengurus.

Anggota koperasi juga menyampaikan bahwa dalam pengambilan keputusan, pengurus koperasi tidak mendapat intervensi dari pihak luar. Semua keputusan bersumber dari dalam koperasi sendiri, meskipun kadang partisipasi anggota masih terbatas. Kebebasan dari pengaruh luar ini membuat anggota merasa bahwa koperasi benar-benar milik bersama dan bukan dikendalikan oleh pihak lain.

Faktor dominan yang mempengaruhi loyalitas anggota Koperasi PKK Desa Pattiro Bajo seperti yang telah dipaparkan dari hasil wawancara diatas adalah faktor kenyamanan yang diberikan oleh Koperasi PKK Desa Pattiro Bajo. Hal ini dikarenakan Sebagian besar narasumber mengatakan bahwa yang menjadi alasan menjadi anggota Koperasi PKK Desa Pattiro Bajo adalah kenyamanannya. Hal ini dapat dilihat dari tabel rincian alasan anggota memilih Koperasi PKK Desa Pattiro Bajo berdasarkan hasil wawancara berikut:

Tabel 8. Data Alasan Anggota Memilih Koperasi PKK Desa Pattiro Bajo

No.	Nama Anggota	Tahun Bergabung	Faktor Menjadi Anggota
1.	Hj. Nursiah, S.Pd	2015	Kepercayaan
2.	Sudarmawati	2015	Kenyamanan
3.	Nursiah	2018	Kenyamanan
4.	Hj. Wati	2017	Kenyamanan
5.	Bulan	2020	Kenyamanan

Berdasarkan tabel diatas, maka dapat diketahui bahwa dari 5 narasumber penelitian ini terdapat 4 orang yang menjadi anggota Koperasi PKK Desa Pattiro Bajo dengan alasan kenyamanan yang diberikan oleh Koperasi PKK Desa Pattiro Bajo, 1 orang masih menjadi anggota karena rasa kepercayaan terhadap Koperasi PKK Desa Pattiro Bajo. Penerapan prinsip-prinsip GCG di Koperasi PKK Desa Pattiro Bajo telah menjadi Fondasi Penting dalam membangun loyalitas anggota. Melalui keterbukaan informasi dan keadilan dalam layanan, anggota merasa terlibat secara emosional dan struktural. Oleh karena itu, loyalitas anggota bukan hanya dibentuk oleh manfaat ekonomi, tetapi juga oleh kepercayaan dan kenyamanan yang tumbuh dalam koperasi.

Pembahasan

Penerapan Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance

Aspek transparansi (*Transparency*) *Good Corporate Governance* di Koperasi PKK desa Pattiro Bajo dapat terlihat melalui keterbukaan melalui penyampaian laporan keuangan tahunan. Keterbukaan laporan keuangan merupakan salah satu aspek penting dalam pengelolaan Lembaga atau organisasi, baik kecil maupun besar. Keterbukaan keuangan dapat diartikan sebagai penyediaan informasi keuangan yang akurat, memadai, dan tepat waktu kepada pihak-pihak yang berkepentingan, terutama anggota organisasi (Suparno, 2023). Koperasi PKK Desa Pattiro Bajo menunjukkan dedikasinya terhadap transparansi dengan memberikan Salinan laporan keuangan kepada semua anggota, Salinan laporan keuangan ini berisi laporan perhitungan hasil usaha. Keterbukaan laporan keuangan ini memiliki beberapa manfaat bagi organisasi, antara lain: Membangun Kepercayaan Anggota, Meminimalisir Risiko Korupsi, Meningkatkan Efektifitas Pengelolaan Organisasi

Aspek akuntabilitas (*Accountability*) dalam *Good Corporate Governance* di Koperasi PKK Desa Pattiro Bajo masih bersifat formal, reaktif, dan minim partisipasi. Sikap reaktif pengurus menunjukkan bahwa akuntabilitas belum menjadi budaya yang dibangun secara konsisten, melainkan hanya muncul ketika ada tekanan atau keluhan. Selain itu, laporan tahunan hanya

menjadi formalitas saja, tanpa diikuti dengan mekanisme evaluasi atau umpan balik dari anggota. Padahal, diskusi dalam forum seperti rapat anggota tahunan sangat penting sebagai bentuk pertanggungjawaban terbuka dari pengurus kepada seluruh anggota. Tetapi, dengan adanya komitmen dari pengurus dalam menyusun laporan formal, yang merupakan bentuk awal dari pelaksanaan prinsip akuntabilitas. Namun, efektifitasnya masih bergantung pada keterlibatan aktif Anggota dalam membaca dan menanggapi laporan tersebut. Agar prinsip ini berjalan dengan baik, koperasi perlu: Meningkatkan pelibatan anggota dalam proses pengambilan keputusan, Menyediakan forum evaluasi terbuka secara berkala. Mengubah pola pelaporan dari reaktif menjadi proaktif.

Aspek tanggungjawab (*Responsibility*) dalam *Good Corporate Governance* di Koperasi PKK Desa Pattiwo Bajo terlihat dari kepatuhan hukum dengan memiliki izin resmi dan menjalani pengawasan dari dinas koperasi. Memiliki surat izin resmi merupakan bentuk kepatuhan hukum yang penting bagi koperasi. Surat izin seperti SIUP (Surat Izin Usaha Perdagangan), menunjukkan bahwa koperasi diakui secara legal dan telah memenuhi persyaratan hukum untuk beroperasi. Pengawasan dari dinas koperasi memastikan koperasi menjalankan kegiatan sesuai dengan peraturan dan standar yang berlaku, sehingga menjaga kestabilan dan Kesehatan koperasi. Koperasi telah menunjukkan komitmen untuk taat terhadap ketentuan yang berlaku, seperti: Laporan pertanggungjawaban tahunan (LPJ), Laporan Keuangan (Neraca dan SHU), Pembaruan struktur kepengurusan, Validasi data keanggotaan dan Dokumen legalitas dan izin operasional.

Kepatuhan tersebut tidak hanya menunjukkan bahwa koperasi beroperasi secara sah, tetapi juga mencerminkan tanggung jawab eksternal koperasi terhadap Lembaga pengawas. Selain itu, kepatuhan administratif ini juga berperan penting dalam menjaga status koperasi agar tetap aktif, sehat, dan berhak mengikuti pembinaan atau bantuan dari pemerintah. Namun demikian, meskipun pembaruan dokumen dilakukan secara rutin, berdasarkan wawancara lainnya, ditemukan bahwa anggota belum sepenuhnya memahami isi atau tujuan dari pembaruan administrasi tersebut, karena informasi ini jarang disosialisasikan secara langsung. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun kepatuhan administrative sudah dilaksanakan oleh pengurus, namun tanggung jawab dalam menyampaikan informasi dan edukasi kepada anggota masih perlu ditingkatkan agar prinsip responsibilitas tidak hanya berjalan secara teknis, tetapi juga secara edukatif dan transparan.

Penerapan aspek kemandirian (*independency*) di Koperasi PKK Desa Pattiwo Bajo telah menjaga prinsip independensi dari pihak eksternal, karena tidak ada tekanan atau arahan dari luar dalam proses pengambilan keputusan. Ini menunjukkan bahwa koperasi memiliki kemandirian dalam mengelola organisasinya tanpa dipengaruhi kepentingan luar. Tujuan terwujudnya perspektif pengambilan keputusan ialah mendukung pembangunan sebuah kondisi yang mampu memaksimalkan harapan. Jika kejadian yang diharapkan belum/tidak terwujud, maka muncullah masalah atau resiko. Teori pengambilan keputusan mencoba untuk meminimasi resiko yang mungkin muncul, dimana kelak harus dihadapi oleh pemimpin yang merumuskan keputusan (Sriyono & Kumalasari, 2020). Dalam mengambil keputusan, ditemukan sejumlah asumsi yang patut dipatuhi agar imlementasi keputusan memberikan dampak yang diinginkan: Keputusan wajib diambil dengan rasional, Keputusan di implementasikan untuk pengoptimalan hasil, Keputusan berawal dari definisi dan menyatakan masalah, Pengambilan keputusan merumuskan sebuah target yang lengkap, Memilih solusi alternatif dengan skor terbesar, dan Keputusan dihasilkan melalui mekanisme yang sistematis.

Sisi internal, proses pengambilan keputusan belum sepenuhnya mencerminkan prinsip independensi yang partisipatif dan kolektif. Meskipun musyawarah dilakukan, keputusan kerap diambil hanya oleh ketua atau pengurus inti, terutama jika anggota tidak aktif memberikan usulan. Hal ini menunjukkan bahwa struktur pengambilan keputusan masih terpusat, dan partisipasi anggota belum maksimal. Maka koperasi perlu memperkuat mekanisme musyawarah dan mendorong keterlibatan anggota agar proses pengambilan keputusan lebih demokratis dan representative. Aspek kesetaraan (*Fairness*) di Koperasi PKK Desa Pattiro Bajo mencerminkan komitmen terhadap prinsip *Good Corporate Governance* yang mengutamakan semua anggota memiliki hak yang sama dalam kegiatan utama koperasi, seperti simpan pinjam, selama mengikuti peraturan yang berlaku. Dengan adanya prosedur yang mengatur bahwa semua anggota harus mendaftar terlebih dahulu untuk melakukan pinjaman. Hal ini mencerminkan adanya perlakuan adil dan setara bagi seluruh anggota dalam mengakses layanan koperasi.

Prinsip yang sama berdasarkan hak dan kewajiban setiap anggota merupakan sumber daya manusia yang menjadi peran yang patut dihargai dalam perkembangan koperasi dalam pelopor pengelolaan bisnis dan kesejahteraan masyarakat. Pengelolaan koperasi dituntut untuk lebih memberikan pelayanan kepada para anggota yang baik, dikarenakan kompetitor antara koperasi satu dengan yang lain saling berkompetisi memperoleh anggota yang loyal dalam perkembangan koperasi. Selain itu, dengan sikap pengurus yang membantu menjelaskan aturan kepada anggota memiliki pemahaman yang sama, sehingga tidak ada pihak yang dirugikan karena ketidaktahuan. Ini merupakan bentuk tanggungjawab sekaligus menjaga kesetaraan akses terhadap informasi dan layanan koperasi. *Good Corporate Governance* (GCG) merupakan konsep yang fundamental dalam praktik manajerial perusahaan modern dan berfungsi sebagai kerangka acuan untuk mengelola perusahaan secara transparan, akuntabel, dan etis. GCG berakar pada prinsip-prinsip tata Kelola yang baik dan mempengaruhi cara perusahaan beroperasi, dengan tujuan untuk melindungi kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya, meningkatkan efisiensi operasional, serta meminimalkan risiko manajerial dan keuangan.

Secara keseluruhan, penerapan prinsip-prinsip GCG tidak hanya memberikan manfaat bagi perusahaan dalam bentuk peningkatan reputasi, pengelolaan resiko yang lebih baik, dan kinerja keuangan yang lebih stabil, tetapi juga berkontribusi pada pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan menciptakan lingkungan bisnis yang lebih sehat dan beretika. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Lastrida Simbolon (2021) yang dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa Asuransi Jiwasraya (Persero) Medan sudah menerapkan GCG walaupun penerapannya belum optimal dikarenakan masih ada ditemui kendala-kendala dalam penerapan GCG tersebut.

Faktor yang Mempengaruhi Penerapan Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance

Good Corporate Governance (GCG) adalah esensi dari rangkaian proses, kebijakan, dan aturan yang ditetapkan oleh sebuah perusahaan untuk memastikan pengelolaannya dilakukan secara baik dan transparan. di Koperasi PKK Desa Pattiro Bajo, anggota mengaku tidak mengetahui apa itu GCG, dan belum pernah mendapatkan pelatihan GCG. Hal ini menunjukkan bahwa kurangnya pelatihan dan sosialisasi mengenai GCG menjadi salah satu faktor utama yang mempengaruhi rendahnya pemahaman dan penerapan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* di koperasi.

Keterbatasan dana koperasi menjadi salah satu faktor yang memengaruhi penerapan prinsip Good Corporate Governance, khususnya pada aspek transparansi dan akuntabilitas. Karena dana terbatas, Koperasi PKK Desa Pattiro Bajo belum mampu menyediakan sistem pelaporan yang baik atau menyampaikan laporan secara rutin tiap bulan, sehingga informasi keuangan hanya disampaikan sekali dalam setahun saat rapat tahunan. Untuk memperkuat GCG, koperasi perlu meningkatkan kapasitas pengurus dan anggota melalui pelatihan serta membangun sistem pelaporan dan pengambilan keputusan yang lebih transparan dan akuntabel. Selain itu pengurus koperasi mengeluh bahwa tidak semua anggota aktif berpartisipasi. Kondisi ini menyebabkan pengambilan keputusan seringkali dilakukan sepihak oleh pengurus tanpa diskusi. Hal ini bertentangan dengan prinsip akuntabilitas dan partisipasi dalam GCG.

Adanya partisipasi para anggota menggunakan jasa koperasi baik itu menggunakan jasa produk tabungan atau pinjaman. Maka dengan adanya tambahan modal dalam bentuk simpanan akan dapat digunakan oleh pihak koperasi untuk menyalurkan Kembali dana ini dalam bentuk pinjaman yang dapat mendatangkan pendapatan dalam bentuk bunga, sehingga dengan banyaknya pinjaman yang disalurkan, maka pendapatan yang diterima dalam bentuk bunga akan meningkat yang secara otomatis dapat meningkatkan keberhasilan koperasi. (Tiara & Suwena, 2024). Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan (Nainggolan et al., 2016) yang dalam penelitiannya menyimpulkan hasil analisis menunjukkan enam dari sepuluh indikator dianggap tidak penting, oleh pengurus, sepuluh indikator sudah dianggap penting, namun pelaksanaannya masih rendah, sementara empat indikator lainnya dapat dikatakan sudah berjalan baik. Belajar dari hasil analisis dan pemahaman fakta lapangan selama penelitian, serta masukan dan rekomendasi yang diperoleh dari FGD, kami menyimpulkan bahwa untuk membangun GCG berdasarkan prinsip-prinsip dan nilai-nilai koperasi adalah melalui Pendidikan dan pembangunan karakter semua pihak pemangku kepentingan.

Bentuk Penerapan Good Corporate Governance (GCG) Dalam Meningkatkan Loyalitas Anggota di Koperasi PKK Desa Pattiro Bajo

Good Corporate Governance (GCG) adalah esensi dari rangkaian proses, kebijakan, dan aturan yang ditetapkan oleh sebuah perusahaan untuk memastikan pengelolaannya dilakukan secara baik dan transparan. Bagi Koperasi PKK Desa Pattiro Bajo, dengan transparansi informasi, terutama laporan keuangan, dapat memperkuat loyalitas anggota. Rasa percaya ini mendorong anggota untuk tetap bertahan sebagai bagian dari koperasi, ini menunjukkan bentuk loyalitas yang tumbuh karena kejelasan dan keterbukaan informasi dari pengurus. Selain itu perlakuan adil kepada seluruh anggota dapat meningkatkan rasa loyalitas. Ketika anggota merasa tidak ada pilih kasih dan semua memiliki hak dan kewajiban yang sama, tercipta rasa nyaman, percaya, dan keinginan untuk tetap menjadi bagian dari koperasi. Rasa keadilan ini memperkuat ikatan emosional anggota terhadap koperasi, sehingga mereka lebih setia dan tidak berpindah ke Lembaga lain.

Pada dasarnya mutu layanan memiliki pengaruh signifikan terhadap peningkatan loyalitas pelanggan/anggota. Semakin bagus mutu layanan koperasi, maka loyalitas anggota akan semakin besar. Pemberian layanan seketika pada waktu diminta nasabah sangat menginginkan nasabah yang peka dan tanggap pada saat nasabah membutuhkan bantuan (Novijanti et al., 2022). Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Kosim yang dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa *Good Corporate Governance* berpengaruh langsung

terhadap loyalitas anggota melalui kepercayaan pada KSPPS Berkah Abadi Gemilang Jepara (Kosim, 2020). Hal ini didasari pada analisis jalur pengaruh *Good Corporate Governance* terhadap Kepercayaan dalam mencapai loyalitas anggota diperoleh nilai pengaruh tidak langsung lebih besar dari pengaruh langsungnya.

Kesimpulan

Penerapan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) di Koperasi PKK Desa Pattiro Bajo menunjukkan adanya upaya untuk menciptakan tata Kelola koperasi yang baik, namun masih menghadapi beberapa kendala. Transparansi mulai diterapkan, terutama melalui penyampaian laporan keuangan tahunan, namun keterbatasan dana dan sarana membuat pelaporan belum dilakukan secara rutin dan menyeluruh. Akuntabilitas belum sepenuhnya berjalan dengan baik. Pengurus telah membuat laporan pertanggungjawaban, tetapi kurangnya diskusi terbuka dan partisipasi anggota mengurangi efektivitas prinsip ini. Responsibilitas telah dilakukan dalam bentuk kepatuhan terhadap aturan dan pembaruan dokumen sesuai ketentuan Dinas Koperasi, namun sifat pengelolaan yang masih reaktif perlu diperbaiki. Independensi relative terjaga karena pengambilan keputusan dilakukan tanpa intervensi pihak luar. Fairness diterapkan melalui perlakuan yang setara terhadap semua anggota. Faktor yang mempengaruhi penerapan GCG di Koperasi PKK Desa Pattiro Bajo yaitu kurangnya pemahaman anggota terhadap prinsip GCG, disebabkan oleh tidak adanya pelatihan atau sosialisasi khusus mengenai tata Kelola koperasi yang baik. Selain itu, minimnya partisipasi anggota dalam pengambilan keputusan dan keterbatasan dana yang menyebabkan pelaporan dan administrasi koperasi belum berjalan dengan rapi dan konsisten. Penerapan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) di Koperasi PKK Desa Pattiro Bajo berkontribusi secara nyata terhadap peningkatan loyalitas anggota. Bentuk penerapan tersebut seperti transparan dalam pelaporan keuangan, yang membuat anggota merasa percaya dan aman karena mengetahui pengguna dana koperasi secara jelas.

Penelitian Ini Memiliki Keterbatasan antara lain penelitian hanya dilakukan pada satu koperasi sehingga hasilnya belum tentu dapat digenerasikan ke koperasi lain dengan stuktur, budaya dan skala berbeda, wawancara dilakukan dengan jumlah responden yang relative sedikit yang bisa membatasi keberagaman perspektif anggota koperasi terhadap penerapan GCG. Peneliti berikutnya perlu memperhatikan lebih banyak melibatkan anggota koperasi dan pengurus dalam pengambilan data agar hasil penelitian memiliki validitas dan reliabilitas yang lebih tinggi.

Acknowledgment

-

Daftar Pustaka

- Ardianto, Y. (2024). Memahami Metode Penelitian Kualitatif. Artikel, DJKN, Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- Asriani., Taufik I., & Nizar. (2024). Penguatan PKK Untuk Menumbuhkembangkan Koperasi Wanita Di Desa Lapeo. *Abdimas: Papua Journal of Community Service* 6(1): 58–62. [doi:10.33506/pjcs.v6i1.3127](https://doi.org/10.33506/pjcs.v6i1.3127).

- Handayani, P., Nyoman A., Surya D., & Julianto I. (2024). "Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Kinerja Pengelolaan Koperasi Simpan Pinjam Di Kabupaten Jembrana." 15: 448–63. <https://doi.org/10.23887/jap.v15i02.78367>
- Handayani., Ramona., & Rahmadania R. (2020). Peran Koperasi Unit Desa (KUD) Dalam Meningkatkan Produktivitas Kelompok Tani Di Desa Tanah Habang Kanan Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan." *Inovatif Jurnal Administrasi Niaga* 2(2): 22–31. [doi:10.36658/ijan.2.2.75](https://doi.org/10.36658/ijan.2.2.75).
- Juliady, R. D. (2024). "Strategi Kesuksesan Tribun Timur Raih Youtube Awards 2022 Kategori Most Viewed News Channel." *Skripsi* 15(1): 37–48.
- Muhammad., Hilda H., & M. Iqbal. (2023). "Peran Koperasi Dalam Meningkatkan Perekonomian Pondok Pesantren Izzatuna Putra Palembang Dalam Perspektif Ekonomi Syariah." *Jurnal Penelitian Ilmu Ekonomi dan Keuangan Syariah* 1(4): 310–20. [doi:10.59059/jupiekes.v1i4.495](https://doi.org/10.59059/jupiekes.v1i4.495).
- Nainggolan, K., Parulian., Tohap., & Ali U. (2016). "Indikator Membangun Good Cooperative Governance, Untuk Menumbuhkan Kepercayaan Masyarakat Terhadap Koperasi, Studi Di Kota Medan." *Jurnal Aplikasi Manajemen* 14(2). [doi:10.18202/jam23026332.14.2.15](https://doi.org/10.18202/jam23026332.14.2.15).
- Nashrullah, M., Fahyuni., Fariyatul, E., Nurdyansyah, U., & Rahmania S. (2023). Metodologi Penelitian Pendidikan (Prosedur Penelitian, Subyek Penelitian, Dan Pengembangan Teknik Pengumpulan Data) Metodologi Penelitian Pendidikan (Prosedur Penelitian, Subyek Penelitian, Dan Pengembangan Teknik Pengumpulan Data). [doi:10.21070/2023/978-623-464-071-7](https://doi.org/10.21070/2023/978-623-464-071-7).
- Novijanti., Erma M., & Fransiska R. Z. (2022). "Strategi Pengembangan Loyalitas Anggota Koperasi Karyawan Danakita Syariah." *MANAJEMEN IKM: Jurnal Manajemen Pengembangan Industri Kecil Menengah* 15(2): 102–9. [doi:10.29244/mikm.15.2.102-109](https://doi.org/10.29244/mikm.15.2.102-109).
- Nurdewi. (2022). "Implementasi Personal Branding Smart Asn Perwujudan Bangga Melayani Di Provinsi Maluku Utara." *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah* 1(2): 297–303. [doi:10.55681/sentri.v1i2.235](https://doi.org/10.55681/sentri.v1i2.235).
- Nurhaliza, Siti, Maritim Raja Ali Haji, and Universitas Maritim Raja Ali Haji. (2023). "Implementasi Prinsip Good Corporate Governance Pada Perusahaan Di Indonesia." *Aufklarung: Jurnal Pendidikan* 3(3): 240–47. [doi: http://pijarpemikiran.com/index.php/Aufklarung](http://pijarpemikiran.com/index.php/Aufklarung).
- Kosim A. (2023). Skripsi Ekonomi Islam Efektivitas Program Si Jagai (Siap, Jemput, Antar, Jaga Dan Peduli) Dalam Peningkatan Pelayanan Kesehatan Di Kabupaten Pangkajene Dan Kepulauan.
- Thayf, S. H., Supartiningsih S., & Mukhtasar S. (2022). "Koperasi Sebagai Harapan Perekonomian Masa Depan." *Coopetition: Jurnal Ilmiah Manajemen* 13(1): 45–54. [doi:10.32670/coopetition.v13i1.570](https://doi.org/10.32670/coopetition.v13i1.570).
- Sari, I. P. (2021). "Penerapan Corporate Governance Terhadap Kinerja Perusahaan." *Juripol* 4(1): 90–97. [doi:10.33395/juripol.v4i1.10987](https://doi.org/10.33395/juripol.v4i1.10987).
- Sriyono & Kumalasari. (2020). 1 Umsida Press Sidoarjo Universitas Buku Ajar Mata Kuliah.

- Sugiyono. 2017. *“Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D.* Bandung: Alfabeta.”
- Suparno. (2023). “Keterbukaan Keuangan, Kunci Keberhasilan Organisasi”, Artikel, Dero Desa. Id.
- Suprapti, E., FarhanA, F., & Achmad S. (2019). “Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Environmental Disclosure.” *Akuntabilitas* 12(2): 215–26. [doi:10.15408/akt.v12i2.13225](https://doi.org/10.15408/akt.v12i2.13225).
- Tholibiln, and Nahdlatuth. (2024). “Institut Agama Islam Negeri (lain) Metro 1445 H / 2024 M Institut Agama Islam Negeri (lain) Metro.”
- Tiara, L, & Suwena. (2024). Pengaruh Partisipasi Anggota Terhadap Keberhasilan Koperasi Simpan Pinjam Di Kecamatan Buleleng Program Studi Pendidikan Ekonomi , Universitas Pendidikan Ganesha. 16(3): 545–53. [doi:10.23887/jjpe.v16](https://doi.org/10.23887/jjpe.v16).